

TESIS

**OPTIMALISASI PENGAWASAN INSPEKTORAT
KABUPATEN MAGELANG DALAM MEWUJUDKAN
TATA PEMERINTAHAN YANG BAIK
(*GOOD GOVERNANCE*)**



CH. MERRY INDARWATI

No.Mhs: 115201590/MIH

PROGRAM STUDI MAGISTER ILMU HUKUM

PROGRAM PASCASARJANA

UNIVERSITAS ATMA JAYA YOGYAKARTA

2013



UNIVERSITAS ATMA JAYA YOGYAKARTA
PROGRAM PASCA SARJANA
PROGRAM STUDI MAGISTER HUKUM

PERSETUJUAN TESIS

Nama : CH. MERRY INDARWATI
Nomor mahasiswa : 115201590/MIH
Konsentrasi : Hukum Tata Negara
Judul Tesis : Optimalisasi Pengawasan Inspektorat Kabupaten
Magelang dalam mewujudkan Tata Pemerintahan
Yang Baik (*Good Governance*)

Nama Pembimbing	Tanggal	Tanda Tangan
Dr. W.Riawan Tjandra, SH., M.Hum
Y. Hartono, SH., M.Hum



UNIVERSITAS ATMA JAYA YOGYAKARTA
PROGRAM PASCA SARJANA
PROGRAM STUDI MAGISTER HUKUM

PENGESAHAN TESIS

Nama : CH. MERRY INDARWATI
Nomor mahasiswa : 115201590/MIH
Konsentrasi : Hukum Tata Negara
Judul Tesis : Optimalisasi Pengawasan Inspektorat Kabupaten
Magelang dalam mewujudkan Tata Pemerintahan
Yang Baik (*Good Governance*)

Nama Penguji	Tanggal	Tanda Tangan
Dr. W. Riawan Tjandra, SH., M.Hum (Ketua)
Y. Hartono, SH., M.Hum (Sekretaris)
Dr. Paulinus Soge, SH., M.Hum (Anggota)

Ketua Program Studi

B. Bambang Riyanto, SH.,M.Hum

PERNYATAAN KEASLIAN TESIS

Dengan ini penulis menyatakan bahwa tesis ini, dengan judul : Optimalisasi Pengawasan Inspektorat Kabupaten Magelang dalam Mewujudkan Tata Pemerintahan Yang Baik (*Good governance*) merupakan karya asli penulis dan bukan merupakan hasil plagiat dan belum pernah diajukan untuk memperoleh gelar kesarjanaan di Perguruan Tinggi. Sepanjang pengetahuan penulis juga tidak terdapat karya atau pendapat yang pernah ditulis atau diterbitkan oleh orang lain, kecuali yang secara tertulis diacu dalam naskah ini dan disebutkan daftar pustaka.

Yogyakarta, Pebruari 2013

Yang menyatakan

Ch. Merry Indarwati

INTISARI

Penelitian ini bertujuan mengidentifikasi mengenai optimalisasi pelaksanaan tugas pokok dan fungsi Inspektorat dalam melaksanakan pengawasan terhadap penyelenggaraan pemerintahan daerah dalam mewujudkan tata pemerintahan yang baik (*Good Governance*). Penelitian ini juga untuk mengetahui hambatan-hambatan yang dihadapi oleh Inspektorat dan upaya-upaya yang dilakukan Inspektorat Kabupaten Magelang.

Hasil penelitian menunjukkan bahwa Inspektorat Kabupaten Magelang belum optimal dalam melaksanakan pengawasan di lingkungan Pemerintah Daerah Kabupaten Magelang, karena Inspektorat belum sepenuhnya berpedoman pada Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 23 Tahun 2007 tentang Pedoman Tata Cara Pengawasan Penyelenggaraan Pemerintah Daerah. Sebagai perangkat daerah, Inspektorat Kabupaten Magelang berperan melaksanakan urusan wajib pemerintah Kabupaten Magelang di bidang pemerintahan umum dengan melaksanakan tugas dan fungsi pengawasan. Guna mewujudkan tata pemerintahan yang baik (*good governance*). Hambatan-hambatan dalam pelaksanaan pengawasan penyelenggaraan pemerintahan daerah, selain adanya kebijakan juga dipengaruhi belum adanya komitmen pimpinan daerah dan adanya keterbatasan sumber daya manusia, sarana prasarana dan anggaran pengawasan.

Pengawasan Inspektorat dalam penyelenggaraan pemerintahan daerah agar dapat optimal dalam mewujudkan tata pemerintahan yang baik (*good governance*) maka perlu adanya penguatan peran strategis Aparat Pengawas Intern Pemerintah (APIP) dan meningkatkan kompetensi dan profesionalisme.

Kata kunci : pengawasan, tata pemerintahan yang baik

ABSTRACT

This research is done as a purpose to identify the implementation of our Inspectorate's main duty and function, as it is to control coordination of regional government in the way to become a good governance. This is also to reveal if any obstacle is still a problem and what efforts are carried by The Inspectorate of Magelang Regency.

This research shows that The Inspectorate of Magelang Regency has not been so serious in its implementation of monitoring the Regional Government of Magelang Regency. It is because of the Inspectorate is not in the orientation of the Rule of Ministry of Internal Affairs, Article 23, 2007. The rule is about The Orientation of Methods of Monitoring the Implementation of Regional Government. As its rule of Regional Implementer. The Inspectorate of Magelang has its obligation in the sector of general governmental to be done by actualizing the duty and the function of monitoring, as it heads toward a good governance. The obstacles in this implementation is the existence of **kebijakan**, get the commitment from the regional governor needs to be risen, also the insufficient human resources, facilities and funds become one of these obstacles.

The Inspectorate of Magelang Regency must not "place the blame on", get plays its role as a quality guarantor and a consultant of coordinating the regional government.

Keywords : monitoring, a good governance.

KATA HANTAR

Salam Kasih,

Dengan memanjatkan puji dan syukur kepada Tuhan Yang Maha Kasih yang telah melimpahkan rahmat dan kasihnya kepada penulis, sehingga penyusunan tesis yang berjudul **Optimalisasi Pengawasan Inspektorat Kabupaten Magelang Terhadap Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah dalam Mewujudkan Tata Pemerintahan Yang Baik (*Good governance*)** dapat diselesaikan.

Penyusunan tesis ini dimaksudkan untuk melengkapi syarat guna memperoleh gelar Magister Humaniora pada Program Studi Magister Ilmu Hukum Universitas Atma Jaya Yogyakarta.

Dalam penyusunan tesis ini tidak akan berhasil dengan baik tanpa bimbingan serta dukungan dari berbagai pihak. Untuk itu penulis mengucapkan terima kasih yang sebesar-besarnya kepada yang terhormat :

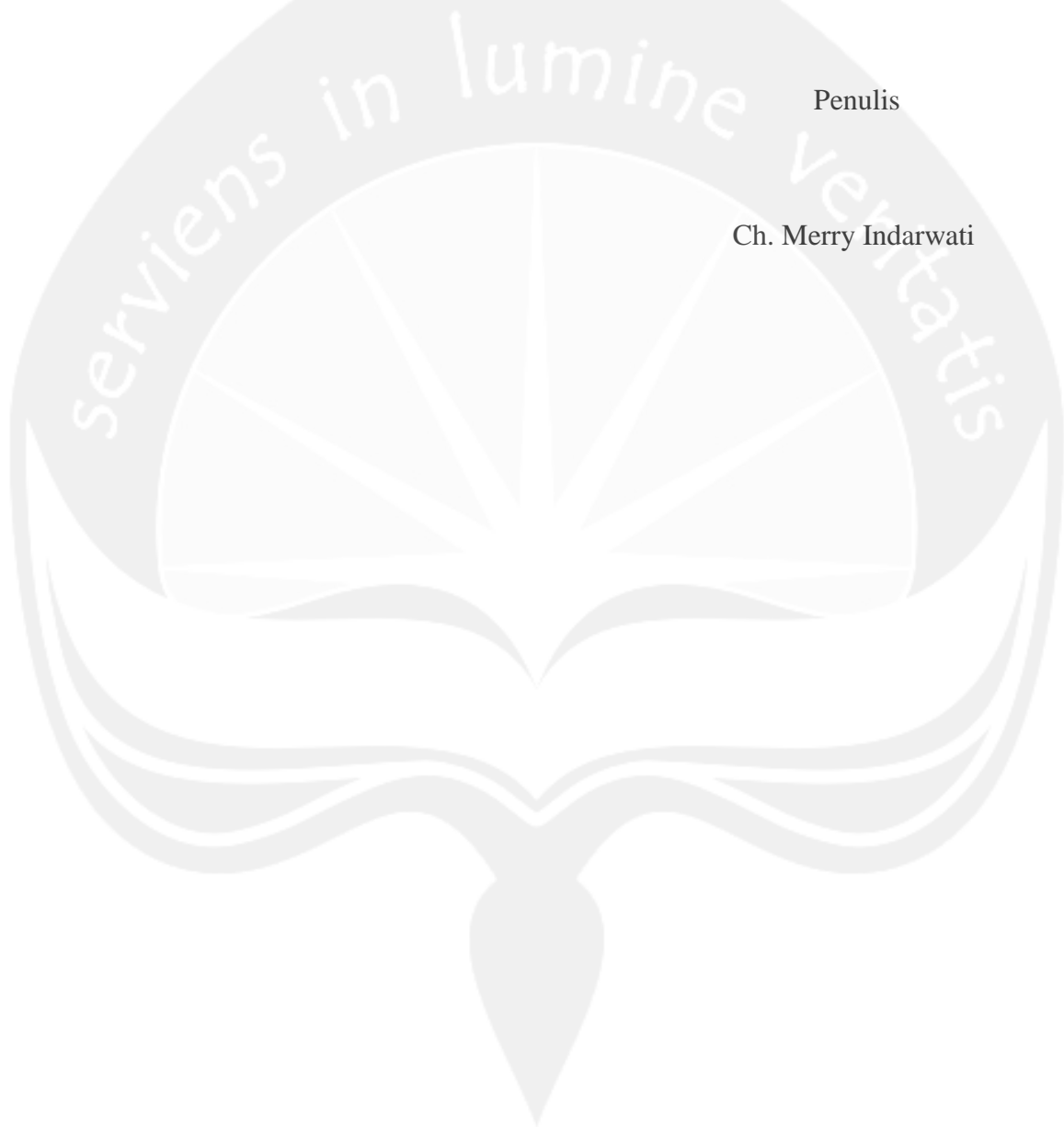
1. Bapak Dr. R.Maryanto., MA, selaku Rektor Universitas Atma Jaya Yogyakarta.
2. Bapak Prof. Dr. Parnawa, SH.M.Hum, selaku Direktur Pasca Sarjana Universitas Atma Jaya Yogyakarta.
3. Bapak B. Bambang Riyanto, SH., M.Hum selaku Ketua Program Magister Ilmu Hukum Universitas Atma Jaya Yogyakarta.
4. Bapak Dr.W. Riawan Tjandra, SH., M.Hum selaku Ketua/Penguji/Pembimbing Utama yang telah banyak membantu memberikan bimbingan dan petunjuk bagi penyusunan tesis ini.

5. Y. Hartono, SH., M.Hum selaku Anggota/Penguji/CoPembimbing yang telah banyak membantu memberikan bimbingan dan petunjuk bagi penyusunan tesis ini.
6. Bapak Dr. Paulinus Soge, SH., M.Hum selaku Anggota/Penguji yang telah memberikan masukan dan petunjuk bagi perbaikan penyusunan tesis ini.
7. Bapak/Ibu dosen pengajar Program Magister Ilmu Hukum Universitas Atma Jaya Yogyakarta.
8. Bapak Bupati Magelang yang telah memberikan ijin untuk menempuh pendidikan Program Magister Ilmu Hukum dan ijin penelitian dilingkungan Pemerintah Daerah Kabupaten Magelang.
9. Bapak Plt. Inspektur, Inspektur dan jajarannya di lingkungan Inspektorat Kabupaten Magelang telah memberikan kesempatan kepada penulis untuk menempuh pendidikan Program Magister Ilmu Hukum dan kemudahan guna kelancaran penelitian yang penulis lakukan di Inspektorat Kabupaten Magelang.
10. Suami dan anak-anakku atas doa dan dukungannya yang telah memberikan motivasi yang kuat untuk keberhasilan penyusunan tesis ini.
11. Teman-teman angkatan September 2011 Magister Ilmu Hukum Program Pasca Sarjana Universitas Atma Jaya Yogyakarta.
12. Semua pihak yang tidak dapat penulis sebutkan satu persatu yang telah berkenan memberikan dukungan dan bantuan guna terselesainya tesis ini.

Penulis menyadari bahwa tesis ini masih jauh dari sempurna, oleh karena itu kritik dan saran untuk penyempurnaan tesis ini sangat penulis harapkan. Akhir kata penulis berharap semoga tesis ini dapat memberikan manfaat bagi pembaca pada umumnya dan dunia pendidikan.

Penulis

Ch. Merry Indarwati



DAFTAR ISI

	Halaman
HALAMAN SAMPUL	
HALAMAN JUDUL.....	i
HALAMAN PERSETUJUAN TESIS.....	ii
HALAMAN PENGESAHAN TIM PENGUJI.....	iii
PERNYATAAN KEASLIAN	iv
INTISARI.....	v
ABSTRACT.....	vi
KATA HANTAR.....	vii
DAFTAR ISI.....	x
DAFTAR TABEL.....	xii
DAFTAR GAMBAR.....	xiii
DAFTAR SINGKATAN.....	xiv
BAB I PENDAHULUAN.....	1
A. Latar Belakang Masalah.....	1
B. Rumusan Masalah.....	6
C. Batasan Masalah.....	7
D. Batasan Konsep.....	8
E. Keaslian Penelitian	10
F. Manfaat Penelitian.....	13
G. Tujuan Penelitian.....	13
H. Landasan Teori.....	14
I. Sistematika Penulisan.....	18
BAB II TINJAUAN PUSTAKA.....	20
A. Pengawasan.....	20
1. Pengawasan secara umum.....	20
2. Pengawasan Inspektorat.....	24
B. Pemerintahan Daerah.....	43
C. Tata Pemerintahan Yang Baik.....	46
BAB III METODOLOGI PENELITIAN	65
A. Jenis Penelitian.....	65
B. Pendekatan Hukum.....	65
C. Data Penelitian.....	67
D. Analisis Hukum.....	69
BAB VI HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN.....	74
A. Optimalisasi pelaksanaan tugas pokok dan fungsi Inspektorat Kabupaten Magelang.....	74
1. Sejarah Pengawasan.....	74
2. Gambaran Umum Kabupaten Magelang.....	79

3. Kondisi Inspektorat Kabupaten Magelang.....	87
a. Profil Inspektorat Kabupaten Magelang.....	87
b. Visi dan Misi Inspektorat Kabupaten Magelang.....	87
c. Tujuan, Strategi dan kebijakan Inspektorat Kabupaten Magelang.....	87
d. Kedudukan, Tugas pokok dan fungsi Inspektorat Kabupaten Magelang.....	89
e. Pelaksanaan pengawasan.....	110
B. Kendala-kendala yang dihadapi Inspektorat Kabupaten Magelang.....	133
1. Aspek peraturan perundang-undangan.....	133
2. Aspek pelaksanaan.....	137
C. Upaya-upaya yang dilakukan Inspektorat Kabupaten Magelang.....	139
BAB V PENUTUP.....	142
A. Kesimpulan.....	142
B. Saran.....	142

DAFTAR PUSTAKA
LAMPIRAN

DAFTAR TABEL

Tabel 1	Tesis Pembanding	12
Tabel 2	Tahapan-tahapan Pemeriksaan.....	35
Tabel 3	Jabatan dalam penugasan pengawasan.....	42
Tabel 4	Jabatan struktural berdasarkan eselon	106
Tabel 5	Jenjang Jabatan Fungsional (JFA)	107
Tabel 6	Jumlah pegawai Inspektorat berdasarkan jenjang pendidikan.....	108
Tabel 7	Anggaran Inspektorat Kabupaten Magelang Tahun 2012.....	109
Tabel 8	Jumlah pengiriman pegawai dalam Diklat Sertifikasi Auditor.....	111
Tabel 9	Objek pemeriksaan tahun 2010 s/d 2012.....	117
Tabel 10	Jumlah Temua Hasil Pengawasan.....	118
Tabel 11	Data hasil pengawasan Inspektorat Kabupaten Magelang	131
Tabel 12	Rekapitulasi kerugian negara dan daerah tahun 2010 s/d 2012.....	131

DAFTAR GAMBAR

Skema 1	Fungsi manajemen pengawasan.....	21
Skema 2	Hubungan dalam jabatan fungsional	43
Skema 3	Struktur organisasi Inspektorat Kabupaten Magelang.....	91



DAFTAR SINGKATAN

KKN	: Korupsi, Kolusi dan Nepotisme.....	2
APIP	: Aparat Pengawas Intern Pemerintah	4
SKPD	: Satuan Kerja Perangkat Daerah.....	6
PKPT	: Program Kerja Pengawasan Tahunan.....	8
BPK	: Badan Pemeriksa Keuangan.....	23
DMP	: Daftar Materi Pemeriksaan.....	33
PKA	: Program Kerja Audit.....	34
JFA	: Jabatan Fungsional Auditor.....	42
LHP	: Laporan Hasil Pemeriksaan.....	36
PFA	: Pejabat Fungsional Auditor.....	107

